

Gambaran Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah

Overview of the Empowerment of Masyarakat Peduli Api (MPA) in Kereng Bangkirai and Sabaru Village Palangka Raya City Kalimantan Tengah

Pamela Dewi Widuri^{1*}, Mochammad Bagus Qomaruddin¹, Rachmat Hargono¹

¹Departemen Epidemiologi, Biostatistika, Kependudukan dan Promosi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Kampus C Mulyorejo, 60115, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Article Info

*Correspondence:

Pamela Dewi Widuri
pamela.dewiduri@gmail.com

Submitted: 08-03-2022
Accepted: 07-06-2022
Published: 28-06-2023

Citation:

Widuri, P. D.,
Qomaruddin, M. B., &
Hargono, R. (2023).
Overview of the
Empowerment of
Masyarakat Peduli Api
(MPA) in Kereng
Bangkirai and Sabaru
Village Palangka Raya
City Kalimantan Tengah.
Media Gizi Kesmas,
12(1), 42–47.
<https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.42-47>

Copyright:

©2023 by the authors,
published by Universitas
Airlangga. This is an
open-access article under
CC-BY-SA license.



ABSTRAK

Latar Belakang: Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat menunjang dalam menanggulangi kasus kebakaran hutan dan lahan adalah Masyarakat Peduli Api (MPA), yaitu masyarakat yang berada di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Tujuan: Mengetahui gambaran umum pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam upaya kesiapsiagaan di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara mendalam dan FGD. Pada penelitian ini pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi dan mendapatkan informasi yang mendalam untuk menggali perspektif dari anggota MPA dan masyarakat terkait.

Hasil: MPA di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru dalam menjalankan menjalankan perannya dinilai sudah memenuhi harapan. Pada awal kinerja MPA Kereng Bangkirai dinilai sangat bagus daripada MPA Sabaru dikarenakan anggota MPA Kereng Bangkirai cukup vokal dan aktif, namun seiring berjalannya waktu terdapat permasalahan internal dalam MPA Kereng Bangkirai yang berefek pada kinerja tim MPA Kereng Bangkirai. Keadaanpun berbalik, kini MPA Sabaru dinilai lebih bagus kinerjanya, karena keaktifan dan kekompakkan dari tim MPA Sabaru.

Kesimpulan: Pemberdayaan MPA di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru sudah cukup baik dalam menjalankan perannya, namun dalam perjalanannya baik MPA Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru memiliki beberapa kendala baik kendala secara internal maupun eksternal.

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan, Masyarakat, MPA, Kebakaran

ABSTRACT

Background: The form of community empowerment that can support in tackling cases of forest and land fires is the Fire Care Community (MPA), namely communities in areas prone to forest and land fires who voluntarily care about controlling forest and land fires who have been trained or given supplies and can be empowered to assist forest and land fire control activities

Objective: To know the general description of the empowerment of the Fire Care Community (MPA) in preparedness efforts in Kereng Bangkirai and Sabaru Villages, Palangka Raya City, Central Kalimantan

Methods: This research was qualitative research with a case study design. Data collection techniques used are in-depth interviews and FGDs. This study used a case

study approach to explore and obtain in-depth information to explore the perspectives of MPA members and related communities.

Results: *Kelurahan Kereng Bangkirai and Sabaru in carrying out their roles had met expectations. At the beginning, the performance of MPA Kereng Bangkirai was considered very good compared to MPA Sabaru because members of MPA Kereng Bangkirai were quite vocal and active. Still, over time there were internal problems in MPA Kereng Bangkirai which affected the performance of MPA Kereng Bangkirai team. The situation turned around, now MPA Sabaru was considered to have better performance because of the activeness and cohesiveness of the MPA Sabaru team.*

Conclusion: *The empowerment of MPA in Kereng Bangkirai and Sabaru Villages has been quite good in carrying out their roles, but along the way, both MPA in Kereng Bangkirai and Sabaru Villages have had several obstacles, both internal and external.*

Keywords: *Community empowerment, Empowerment, Community, MPA, Fire*

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Pada umumnya terjadi pada lahan yang bergambut sehingga sulit untuk dipadamkan dan menimbulkan asap tebal. Tercatat Sejak tahun 1997 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian yang begitu besar baik dari segi ekonomi, sosial, ekologi, dan kesehatan. Pada tahun 2005, 2006, 2015 terjadi musim kemarau yang panjang sehingga mengalami bencana kekeringan dan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan dengan skala yang cukup besar, sehingga hampir selama 3 (tiga) bulan aktifitas rutin masyarakat dan pelayanan transportasi terganggu. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti pembukaan lahan oleh masyarakat yang menggunakan sistem pembakaran lahan, lemahnya pengawasan dan kontrol dalam sistem pembakaran sering menyebabkan api merambat dan menyebar ke area yang lebih luas (BPBD 2017). Faktanya, area hutan semakin berkurang hari demi hari yang salah satu penyebabnya adalah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi baik secara alamiah maupun campur tangan manusia (BNPB 2015)

Dampak langsung dari kebakaran adalah munculnya kabut asap yang mencemari udara sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan transportasi udara, bahkan perubahan iklim global. Dampak lain adalah degradasi lahan, penurunan luas hutan, sehingga mengganggu ekosistem dan nilai ekonomis lahan. Terakhir, dampak kebakaran hutan dan lahan adalah gangguan ekonomi baik pedesaan dan perkotaan (Imanudin *et al.* 2015). Melihat kondisi tersebut kesiapsiagaan dan pengendalian kebakaran sebaiknya pemerintah dengan para pihak diarahkan untuk mengkaji penyebab terjadinya kebakaran hutan (Suhendri *et al.* 2017). Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana untuk meminimalisasi kerugian termasuk menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata

kehidupan masyarakat di kemudian hari (Gregg *et al.* 2004). Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran dan dampak kabut asap yang berkepanjangan, perlu diperkuat terkait penanggulangan kebakaran terutama yang berada di daerah rawan kebakaran.

Peningkatan kapasitas dapat dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sasarannya adalah langsung pada masyarakat itu sendiri agar masyarakat memiliki kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka (Notoatmodjo 2007). Kemandirian sebagai sebuah tujuan, tentunya bukan merupakan proses yang instan. Sebagai proses pemberdayaan terdapat tiga proses didalamnya (Randy 2007). Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dapat menunjang dalam menanggulangi kasus kebakaran hutan dan lahan adalah Masyarakat Peduli Api (MPA), yaitu relawan masyarakat di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan yang peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta telah dilatih atau diberi pembekalan sehingga dapat membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Harapannya dengan adanya MPA dapat membantu pemerintah dalam upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran yang sangat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, bahkan hampir semua sektor di masyarakat.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara mendalam dan FGD. Pada penelitian ini pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi dan mendapatkan informasi yang mendalam untuk menggali perspektif dari anggota MPA dan masyarakat terkait. Wawancara ditujukan kepada anggota MPA di Kel. Kereng Bangkirai dan Sabaru, staff BPBD Kalteng, staff Dinas Lingkungan Hidup Kalteng, staff Dinas Kesehatan Kalteng, BNF sebagai NGO yang terkait dengan program MPA,

perangkat kelurahan, dan petugas promosi kesehatan di Kel. Kereng Bangkirai dan Sabaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil wawancara mendalam kepada informan tentang proses terbentuknya MPA memiliki jawaban yang seragam yaitu dibentuk oleh *Borneo Nature Foundation* (BNF) pada tahun 2017. BNF sendiri merupakan NGO (*Non Government Organisation*) lingkungan di lingkungan Kalimantan Tengah yang peduli dalam kegiatan konservasi lingkungan. *Borneo Nature Foundation* (BNF) mendapatkan dukungan dana hibah *Indonesian Climate Change Trust Fund* (ICCTF) dan *United Kingdom Climate Change Unit* (UKCCU), bulan Februari s/d Desember 2017 untuk penyadartahuan dan penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan dan kegiatan pendidikan mengenai lingkungan dan ancaman kebakaran, yang dalam hal ini adalah Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah Palangka Raya yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru.

MPA (Masyarakat Peduli Api) pertama kali di Palangka Raya dibentuk di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru karena dua kelurahan ini berdekatan dengan Taman Nasional Sabangau. Awal pembentukan kelompok MPA adalah untuk memberdayakan masyarakat disekitar Taman Nasional Sabangau untuk melestarikan lingkungan sekitar seperti melakukan penghijauan dan pembibitan. Namun melihat kondisi alam Kalimantan Tengah yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan membuat kelompok MPA diresmikan dengan tugas utamanya adalah untuk memadamkan api terutama saat sudah memasuki bulan kemarau panjang yang seringkali hutan dan lahan di wilayah Kereng Bangkirai dan Sabaru terbakar. Kelompok MPA diberikan pelatihan untuk pemadaman kebakaran, sehingga tidak hanya MPA (Masyarakat Peduli Api) pertama kali di Palangka Raya dibentuk di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru karena dua kelurahan ini berdekatan dengan Taman Nasional Sabangau. Awal pembentukan kelompok MPA adalah untuk memberdayakan masyarakat disekitar Taman Nasional Sabangau untuk melestarikan lingkungan sekitar seperti melakukan penghijauan dan pembibitan. Namun melihat kondisi alam Kalimantan Tengah yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan membuat kelompok MPA diresmikan dengan tugas utamanya adalah untuk memadamkan api terutama saat sudah memasuki bulan kemarau panjang yang seringkali hutan dan lahan di wilayah Kereng Bangkirai dan Sabaru terbakar. Kelompok MPA diberikan pelatihan untuk pemadaman kebakaran, sehingga tidak hanya pemberdayaan untuk menjaga lahan mereka sendiri, namun juga melatih kepedulian dan kesiapsiagaan dalam menjaga lingkungan bersama.

Hal tersebut sejalan dengan sebuah penelitian yang dilakukan di Bandung tahun 2011 bahwa

komitmen organisasi merujuk kepada perilaku manusia dan sejauh mana individu tersebut berkomitmen terhadap suatu organisasi (Fauzi *et al.* 2011). Sejalan dengan Pemerintah Kota Makassar menerbitkan PERDA Nomor 41 Tahun 2001, tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Daerah Kota Makassar bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki fungsi sebagai mitra pemerintah (aparatur kelurahan) dalam melakukan pembangunan wilayah. Selain itu terbentuknya MPA dilakukan sebagai upaya pembangunan untuk menjadi masyarakat yang dapat tanggap bencana yang sering terjadi di wilayah setempat. Menurut Peraturan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.2/IV-SET/2014 Pasal 2 mengenai tujuan penyusunan dari peraturan tersebut dipergunakan sebagai pedoman dan dapat menjadi arahan dalam pelaksanaan pembentukan dan pembinaan MPA supaya dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Peraturan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.2/IV-SET/2014 Pasal 3 mengenai Ruang Lingkup yang mencakup a.) pembentukan, b.) organisasi, c.) sarana dan prasarana, d.) pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan e.) pembiayaan, sehingga sesuai dengan peraturan yang tertuang maka anggota MPA harus memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah tertuang pada Peraturan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.2/IV-SET/2014. Pembentukan MPA sebagaimana yang sudah tertuang pada Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.2/IV-SET/2014 Pasal 4 yang menjelaskan bahwa pembentukan MPA harus didasari dengan penetapan desa sasaran, desa yang berbatasan dengan hutan, rawan kebakaran lahan serta berpotensi meluas ke hutan dan atau yang telah ditetapkan oleh Kepala Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai desa sasaran (DirjenSDA 2014). Pada pasal ini juga disebutkan bahwa pembentukan MPA dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yang meliputi perencanaan, persyaratan, pembekalan, dan penetapan, hal tersebut sesuai dengan yang dilakukan untuk membentuk anggota MPA.

Pemberdayaan masyarakat meliputi tiga tahapan yaitu *awareness rising*, *capacity building* dan *empowerment*. Kesiapsiagaan merupakan poin penting keselamatan untuk menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. Memiliki kesiapsiagaan bertujuan untuk mengurangi dampak kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi. Cara yang dilakukan oleh MPA Sabaru dan Kereng Bangkirai dalam rangka *awareness rising* atau kesadaran terkait kesiapsiagaan sebelum kebakaran hutan dan lahan antara lain memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mempunyai lahan kosong untuk tidak membakar lahan tersebut setelah menebangi lahannya. Bentuk kesiapsiagaan MPA Sabaru dan Kereng Bangkirai yang lain yaitu mulai berpatroli

saat musim kemarau tiba. Hal ini sejalan dengan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa upaya pemberian sosialisasi kesiapsiagaan oleh lembaga desa berhasil yang dibuktikan dengan 74% responden mengikuti sosialisasi kesiapsiagaan bencana (Margono *et al.* 2019). Penelitian yang dilakukan di Surabaya menyatakan bahwa ada pengaruh sosialisasi kesiapsiagaan bencana melalui metode simulasi terhadap peningkatan ketrampilan dalam menghadapi bencana pada mahasiswa siaga bencana UNUSA (Winoto *et al.* 2020). *Capacity building* atau Pengkapisitasan yang dilakukan pemerintah kepada MPA Sabaru dan Kereng Bangkirai adalah pemberian pelatihan setiap tahunnya. Pengkapisitasan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan individu maupun kelompok untuk mendukung kegiatan MPA. MPA Sabaru dan Kereng Bangkirai sudah mengikuti pelatihan sebanyak 3-4x pada tahun 2019. Pemateri pelatihan berbeda-beda setiap pertemuan antara lain BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, BNF, dan WWF (BPBD 2017). Materi yang diajarkan pada saat pelatihan yaitu tentang penanggulangan kebakaran hutan, dan *community nursery*. Pemberian pelatihan kepada MPA sudah dirasa cukup karena pelatihan diberikan sudah rutin. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni yang menyatakan bahwa salah satu bentuk pengkapisitasan yang diberikan yaitu pemberian pelatihan panjat tebing kepada Karang Taruna Bukit Putra Mandiri dengan tujuan membekali peserta tentang teknik panjat tebing serta pengenalan alat dan cara penggunaannya sesuai standar keamanan pemanjatan (Wahyuni 2018). Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Simon (2017) yang mengatakan dukungan pemerintah dengan memberikan pelatihan kepada kaum perempuan pengrajin ukiran (*passura*) di Kabupaten Toraja Utara memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan kualitas SDM pengrajin tersebut dan membuka peluang usaha baru seperti membuat kursus membuat ukiran (Simon 2017).

Peranan MPA penting bagi masyarakat yang memiliki minim pengetahuan terhadap pencegahan kebakaran hutan serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sejauh ini MPA melakukan peranannya untuk melakukan pencegahan dan penyuluhan yang dilakukan dengan cara menegur secara langsung warag setempat apabila sedang melakukan pembakaran lahan, membuat spanduk yang bersikan himbaun – himbaun larangan membakar lahan dan atau aktifitas apapun yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Kelompok MPA yang telah dibentuk, harusnya memiliki dampak baik terhadap potensi kebakaran yang terjadi namun pada kenyataannya tidak memiliki pengaruh yang masih dirasa kurang, karena ketika merujuk pada fungsional dari terbentuknya MPA harusnya muncul pertanyaan apa saja yang sudah dilakukan oleh MPA dan tentunya kendala-

kendala yang mungkin dialami oleh MPA. Pada saat membicarakan mengenai MPA, tentunya kita akan mengarah pada peranan dan fungsi yang berasal dari kedudukan suatu individu yang berada didalam suatu lingkungan masyarakat dan memiliki peranan penting (Putra *et al.* 2019). Pendapat dari Newstrom (2014) mengungkapkan bahwa komitmen suatu organisasi dapat dikatakan sebagai loyalitas karyawan, dengan kata lain karyawan mengidentifikasi dirinya terhadap suatu organisasi dan memberikan suatu keputusan untuk melanjutkan berpartisipasi serta berperan aktif dalam organisasi tersebut (Newstrom 2014).

Masyarakat peduli api tidak hanya melakukan penyuluhan namun juga memiliki peranan penting bagi lingkungan yang berpotensi terhadap terjadinya kebakaran, selain untuk mencegah terjadinya kebakaran MPA juga memiliki peran sebagai memadamkan kebakaran dan penanganan lahan setelah kebakaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P. 2/IV-SET/2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api yang bertugas melakukan kegiatan mencegah kebakaran, memadamkan api serta penanganan hutan dan lahan pasca kebakaran. Kegiatan yang dilakukan oleh MPA sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P2/IV-SET/2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api, dimana yang selama ini dilakukan oleh MPA yaitu menghimbau masyarakat untuk tidak membakar lahan dengan menggunakan spanduk, memadamkan kebakaran, serta melakukan penanaman kembali (*nursery*) pada lahan pasca kebakaran hutan (DirjenSDA 2014). Terdapat juga kewajiban – kewajiban sebagai anggota MPA yaitu mengikuti pembekalan dan pelatihan yang telah difasilitasi oleh NGO yang bekerjasama dengan BPBD setempat untuk memberikan materi mengenai tata cara serta kesiapsiagaan untuk mengatasi kebakaran hutan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian perubahan Iklim Nomor P.3/Ppt/SET/ KUM.1/1/2018 yang salah satunya menyampaikan bahwa sebagai anggota MPA harus mengikuti pembekalan teknis bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (DirjenPPI 2018). Kegiatan tersebut dilakukan supaya anggota MPA mampu secara mandiri menghadapi kebakaran hutan yang datangnya secara tiba – tiba dan bantuan juga tidak bisa datang seketika, sehingga perlunya dibentuk anggota MPA supaya masyarakat setempat yang berkomitmen menjadi relawan tersebut dapat menanggulangnya lebih dulu agar tidak menjangkau area yang lebih luas lagi. Tugas pokok dan fungsi adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang anggota organisasi atau instansi atau kelompok secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja

yang telah di susun berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi. Selama menjalankan tupoksinya, pemerintah dalam hal ini Kelurahan Sabaru dan Kereng Bangkirai, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah dan BNF selaku NGO merasa kinerja MPA sudah memenuhi harapan dibuktikan dengan pengorbanan mereka secara waktu, tenaga, dan finansial. Status mereka sebagai volunteer tidak mematahkan semangat mereka dalam bertugas karena mereka mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Pemerintah perlu mengapresiasi lebih kinerja yang telah dilakukan oleh MPA terutama soal finansial. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Calista (2020) yang menyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi berpengaruh sedang terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuwasin (Calista *et al.* 2020). Struktur organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja advokasi. Hal ini diartikan sebagai semakin tingginya pelaksanaan struktur organisasi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja advokasi (Tn *et al.* 2020).

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh MPA Kereng Bangkirai dan Sabaru tentunya tak lepas dari kendala. Beberapa kendala yang dialami oleh MPA Sabaru dan Kereng Bangkirai yang cukup mencolok antara lain masalah pendanaan dan terlalu seringnya pergantian anggota kedua MPA. Sumber dana yang diperoleh MPA sebagian besar dari BNF untuk memenuhi kebutuhan. Jumlah yang diberikan oleh BNF kepada MPA jumlahnya terbatas sehingga mereka sampai rela berhutang untuk memenuhi kebutuhannya. Pernah sekali MPA Kereng bangkirai melakukan penggalangan dana ke masyarakat dengan cara mendatangi rumah-rumah warga. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah (2017) yang menyatakan bahwa terbatasnya dana dalkarhut TNGC yang terbatas menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran (Fadillah *et al.* 2016). Faktor anggaran dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi. Anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan kegiatan dinas yang dibiayai setiap tahunnya membuat Kantor Satpol PP mengalami defisit anggaran sehingga membuat tugas organisasi yang sebelumnya direncanakan belum dilakukan dengan baik (Bagou 2016). Kendala lain yang dialami oleh MPA Sabaru dan Kereng Bangkirai adalah banyak anggota yang berhenti. Alasan mereka berhenti menjadi anggota MPA karena mereka kurang memahami konsep volunteer sehingga mereka menganggap menjadi anggota MPA dapat menjadi landing sampingan mencari uang. Anggota yang sering berganti ini berdampak pada kinerja MPA karena harus mengajari anggota baru lagi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2019) yang mengungkapkan bahwa komitmen organisasi berperan negatif dan signifikan terhadap turnover intension karyawan (Khotimah *et al.* 2019). Pernyataan tersebut dapat

berarti semakin rendah komitmen organisasi karyawan maka meningkatkan turnover intention karyawan. Rahmah dkk (2017) juga mengungkapkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap turnover intention pada karyawan *Sales Promotion Girl* dan *Sales Promotion Boy* SOGO Departement Store Samarinda (Rahmah *et al.* 2017).

KESIMPULAN

Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru diprakarsai oleh Borneo Nature Foundation (BNF) pada tahun 2017, sedangkan untuk BNF merupakan *Non Government Organisation* (NGO) lingkungan di Kalimantan Tengah yang peduli terhadap konservasi lingkungan. MPA dibentuk sebagai upaya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru yang notabenehnya adalah daerah rawan kebakaran. MPA Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru dalam menjalankan menjalankan perannya dinilai sudah memenuhi harapan. Pada awal kinerja MPA Kereng Bangkirai dinilai sangat bagus daripada MPA Sabaru dikarenakan anggota MPA Kereng Bangkirai cukup vokal dan aktif, namun seiring berjalannya waktu terdapat permasalahan internal dalam MPA Kereng Bangkirai yang berefek pada kinerja tim MPA Kereng Bangkirai. Keadaanpun berbalik, kini MPA Sabaru dinilai lebih bagus kerjanya, karena keaktifan dan kekompakkan dari tim MPA Sabaru. MPA dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa kendala dari dalam maupun dari luar. Kendala utama yaitu kendala didalam anggota MPA itu sendiri, terdapat perbedaan sikap dan sifat dari anggota MPA. Kedua MPA, yaitu MPA Kereng Bangkirai dan MPA Sabaru memiliki kendala dari dalam dan dari luar. MPA Sabaru lebih diperhatikan oleh pemerintah setempat karena lebih aktif dibandingkan MPA Kereng Bangkirai. Namun MPA Sabaru juga memiliki kendala dari dalam antara lain, ketidaksetiaan anggota, perselisihan antar anggota dan lain sebagainya. Begitu juga yang terjadi oleh MPA Kereng Bangkirai yang memiliki kendala dari dalam antara lain, kurang aktifnya anggota hingga menyebabkan terjadi pergantian anggota. Kendala dari luar yang sama-sama dialami oleh kedua MPA ini adalah masalah pendanaan yang seringkali menjadi penghambat MPA dalam menjalankan tugasnya karena sangat erat kaitannya dengan operasional lapangan.

ACKNOWLEDGEMENT

Terima kasih penulis berikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penelitian ini, kepada pihak Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru, anggota MPA Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru, pihak BPBD Provinsi Kalimantan

Tengah yang telah membantu dalam proses wawancara dan tidak lupa kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.

REFERENSI

- Bagou, U. (2016) 'Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-pp) Kota Gorontalo', *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 3(1), pp. 8-16.
- BNPB (2015) *Badan Nasional Penanggulangan Bencana. , Hotspot Berkurang Tapi Jarak Pandang Tetap Buruk*. [online]. available: <http://www.bnpb.go.id/berita/2590/hotspot-berkurang-tapi-jarak-pandang-tetap-buruk> (Accessed: 07 Maret 2022).
- BPBD (2017) *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalteng. Laporan Posko Siaga Darurat Bencana 2017*, Palangka Raya: BPBD Kalteng.
- Calista, A., et al. (2020) 'Tugas Pokok Sebagai Fungsi Organisasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin ', *Integritas Jurnal Manajemen Profesional (IJMPRO)*, 1(2), pp. 211-226.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian perubahan Iklim 2018*, No.P.3/Ppt/SET/KUM.1/1/2018
- Peraturan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2014*, No. P.2/IV-SET/2014
- Fadillah, N., et al. (2016) 'Pengendalian Kebakaran Hutan oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) di Taman Nasional Gunung Ciremai', *Media Konservasi*, 21(3), pp. 216-224.
- Fauzi, I. K. A., et al. (2011) 'Mengelola pelatihan partisipatif', *Bandung: Alfabeta*, pp. 8.
- Gregg, C. E., et al. (2004) 'The perception of volcanic risk in Kona communities from Mauna Loa and Hualālai volcanoes, Hawai ` i', *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 130(3-4), pp. 179-196.
- Imanudin, M. S., et al. (2015) 'Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan Terpadu Dalam Upaya Mendukung Program Zero Asap Di Sumatera Selatan', BKPSL Indonesia-PPLH-Unsri, Hotel Novotel Palembang 11-12 November 2015.
- Khotimah, R. D., et al. (2019) 'Analisa Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Turnover Intention Karyawan (Studi Kasus pada Karyawan Bagian Sewing PT dan Liris)', *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02), pp.
- Margono, M., et al. (2019) 'Kesiapsiagaan Masyarakat Di Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Kawasan Resiko Bencana (KRB) III dalam Penanggulangan Bencana', *Wiraraja Medika: Jurnal Kesehatan*, 9(2), pp. 35-41.
- Newstrom, J. (2014) *Organizational behavior: Human behavior at work*, McGraw-Hill Higher Education.
- Notoatmodjo, S. (2007) *Promosi kesehatan & ilmu perilaku*, Rineka cipta.
- Putra, I. K., et al. (2019) 'Tantangan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat tapak', *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 24(2), pp. 151-159.
- Rahmah, T. A., et al. (2017) 'Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Turnover Intention pada Karyawan Sales Promotion Girl dan Sales Promotion Boy Sogo Departement Store Bigmall Samarinda', 2 ed., FORUM EKONOMI, 155-161.
- Randy, R. W. (2007) *Manajemen Pemberdayaan*, Elex Media Komputindo.
- Simon, H. (2017) 'Peran Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Melestarikan Passura (Ukiran) di Kabupaten Toraja Utara', unpublished thesis Universitas Bosowa.
- Suhendri, S., et al. (2017) 'Penguatan Kelembagaan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi', *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), pp. 174-204.
- Tn, T. A., et al. (2020) 'Pengaruh Struktur Organisasi, Kepemimpinan, Motivasi, Terhadap Kinerja Advokasi Legal Officer (Studi Kasus Pt. Ap1)', *Ekobisman-Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), pp. 139-151.
- Wahyuni, D. (2018) 'Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), pp. 85-102.
- Winoto, P. M. P., et al. (2020) 'Pengaruh Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Melalui Metode Simulasi Terhadap Peningkatan Ketrampilan Dalam Menghadapi Bencana Pada Mahasiswa Siaga Bencana (Magana) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya', *Journal of Health Sciences*, 13(2), pp. 157-164.